

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan terhadap perempuan telah terjadi sepanjang masa, dan secara psikologis hal ini bahkan diterima oleh perempuan itu sendiri. Perempuan dikatakan sebagai manusia kelas kedua dan laki-laki lah yang terdepan. Pandangan gender ini mengakibatkan kaum perempuan merasa dirinya tersubordinasi. Adanya anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga tidak tepat menjadi pemimpin, perempuan bahkan berada dalam posisi yang tidak penting. Laki-laki selalu mengklaim dirinya sebagai subjek, sedangkan perempuan dianggap sebagai objek. Laki-laki selalu ingin menjadi bebas atau eksistensialisme, maka ia harus mensubordinasikan perempuan. Hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia ternyata masih didominasi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki ini, tidak mengakomodasikan kesetaraan, keseimbangan, sehingga perempuan menjadi tidak penting untuk diperhitungkan bahkan menghambat kemajuan perempuan.

Dalam tatanan kehidupan manusia yang didominasi laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di

masyarakat. Perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja, sedangkan laki-laki ditempatkan di ranah publik.¹ Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*), bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya.² Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah karena perempuan tidak terlindungi, dan karenanya selalu ada dalam posisi yang penuh risiko serta sangat rentan, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini juga membuat perempuan seringkali menjadi korban.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dilihat dari data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mengenai jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama dalam kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015, 2016, 2017 dapat dikatakan mengalami naik turun. Data penanganan kekerasan pada 2015 tercatat ada 321.752 kasus dengan kasus yang diproses sebanyak 305.535, kemudian pada tahun 2016 jumlah kasus mengalami penurunan dengan jumlah 259.150 dengan kasus yang diproses sebanyak 245.548. Pada tahun 2017 kemudian kasus kekerasan ini mengalami kenaikan dengan jumlah 348.466 dengan

¹ Siti Musidah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 4.

² Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No.1, Juli 2018, hlm. 75.

kasus yang diproses sebanyak 335.062. Hal tersebut ditunjukkan dari data BPS yang menunjukkan data penanganan pada kasus kekerasan tersebut.³

Tabel 1.1 Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)

Jumlah Kasus	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan (Kasus)		
	2015	2016	2017
Jumlah Kasus	321752	259150	348466
Kasus yang Diproses	305535	245548	335062

Sumber: Data BPS (2017)

Pada kenyataannya tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Dalam hal ini kurang adanya kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap perempuan. Mengingat hal ini diperlukan pengantisipasi akan terjadinya berbagai persoalan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Berbagai hambatan yang dijumpai perempuan juga karena masih adanya perempuan yang berpendidikan rendah dengan kurang keterampilan untuk masalah-masalah tertentu, terutama dalam hal teknologi. Rendahnya kualitas hidup perempuan juga disebabkan oleh masih terbatasnya partisipasi, kesempatan, peluang dan akses serta kontrol bagi perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bidang pembangunan baik sebagai agen

³ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/28/1498/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-perempuan-terutama-kekerasan-terhadap-perempuan-2015---2017.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 22:00

perubahan maupun sebagai pemanfaat pembangunan.⁴ Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup perempuan adalah disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adanya iklim atau lingkungan sosial budaya yang belum kondusif terhadap kemajuan perempuan serta masih adanya budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia.

Memperhatikan peranan wanita dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara pria dan wanita. Kaum wanita mengalami diskriminasi tidak saja pada ranah domestik namun pada ranah publik kaum wanita mengalami hal yang sama. Sistem ekonomi industri yang kapitalik yang mengutamakan pertumbuhan dan konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap wanita.⁵ Diskriminasi di bidang ekonomi ini dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima wanita dibanding pria. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan wanita, semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria. Kesenjangan upah yang diterima wanita juga disebabkan karena wanita bukanlah sumber pencari nafkah utama.

Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana

⁴ Zoer'aini Djamal Irwan, *Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia Siapa Bisa Mengendalikan Penyulutnya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 34.

⁵ Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesenjangan Gender*, Jurnal Muwazah Vol. 3, No.1, Juli 2011, hlm. 367.

yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program yang belum peka gender, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri dan kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan.⁶

Kurangnya akan ruang bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dan mencapai kesetaraan gender juga tersudut pada posisi perempuan yang rentan. Sulitnya kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam mencapai kesetaraan gender ini menginspirasi beberapa perempuan dari kalangan aktivis, mahasiswa serta buruh perempuan untuk mencari jalan keluar dengan cara berorganisasi sebagai bentuk wujud mengatasi masalah domestiknya melalui organisasi Perempuan Mahardhika. Organisasi dapat pula digunakan sebagai alat untuk menyampaikan wacana gender termasuk untuk menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan hak-hak yang selama ini terabaikan.

⁶ Triana Sofianai, *Membuka Ruang Partisipasi Dalam Pembangunan*, Jurnal Muwazah Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 64.

Organisasi Perempuan Mahardhika berperan dalam berbagai bentuk persoalan pada perempuan sebagai salah satu bentuk *civil society organization* yang bergerak di bidang kesetaraan gender yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang setara dan sejahtera dengan meluaskan kesadaran gender melalui pendidikan dan mengutamakan partisipasi perempuan. Berbagai bentuk organisasi perempuan bertumbuh, seperti kelompok-kelompok komunitas akar rumput dan LSM semakin banyak, namun belum dalam bentuk yang secara politik melawan keseluruhan sistem yang menindas perempuan, yakni patriarki dan kapitalisme.

Eksistensi organisasi Perempuan Mahardhika sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuatan berjuang dan terlibat aktif untuk melawan segala macam bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan serta organisasi Perempuan Mahardhika terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan mengutamakan partisipasi perempuan dan pendidikan dalam meluaskan kesadaran gender sebagai sebuah tujuan organisasi. Organisasi Perempuan Mahardhika menentang adanya diskriminasi dan juga tindakan penindasan terhadap kaum perempuan. Kelahiran kembali pergerakan ini memberi landasan bagi pembangunan kembali suatu gerakan perempuan yang progresif dan anti kapitalis untuk berjuang melawan iklim politik yang semakin seksis.

Kehadiran organisasi Perempuan Mahardhika di tengah-tengah masyarakat membangun jaringan dengan beberapa organisasi untuk bergerak dalam lima isu utama yang dipandang penting. Isu kekerasan seksual, isu buruh perempuan, isu orientasi

seksual dan gender, isu perempuan dan politik.⁷ Organisasi Perempuan Mahardhika memfokuskan program dan kegiatannya pada perempuan muda kampus dan buruh perempuan.

Organisasi Perempuan Mahardhika merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan oleh masyarakat, organisasi yang didirikan secara sukarela, mandiri dari kekuasaan negara serta tidak berorientasi pada profit, dari sudut pandang *civil society* maka organisasi Perempuan Mahardhika dapat dipandang sebagai bentuk *civil society organization* yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesadaran gender.

Keterlibatan organisasi *civil society* dapat dilihat dari kontribusi atau tujuan aktifitas mereka dalam mewujudkan *public good* dalam masyarakat baik dalam anggotanya maupun masyarakat luas. Dalam hal ini analisis terhadap karakteristik CSO akan menunjukkan kontribusi dan relevan mereka dengan pembangunan. Karakteristik tersebut terdiri dari 8 kategori yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi pekerja, NGO atau LSM, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan organisasi profesi.⁸

Berdasarkan uraian diatas menjadi menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul skripsi tentang “*Peran Organisasi Perempuan Mahardhika Sebagai Civil Society Organization Dalam Meningkatkan Kesadaran Gender*”. Dengan melihat berbagai tindakan penindasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan, hal ini perlu dikaji

⁷ <http://perempuanmahardhika.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 september 2018 pukul 20:00

⁸ Abdi Rahmat, *Civil Society dan Pembangunan*, (Jakarta: Hibah Buku Ajar Universitas Negeri Jakarta, 2014), hlm. 93.

lebih dalam dan hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam melihat sejauh mana tujuan organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran gender.

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan gender pada pengurus organisasi Perempuan Mahardhika. Adanya organisasi Perempuan Mahardhika memberikan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada program dan kegiatan serta peran yang dilakukan oleh organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender.

Organisasi Perempuan Mahardhika sudah bertahan selama 16 tahun dalam memberikan pemahaman mengenai perjuangan perempuan dan pemahaman mengenai kesetaraan gender, edukasi dan mengadvokasi permasalahan perempuan melalui program-program dan kegiatannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan penelitian bahwa dengan adanya organisasi Perempuan Mahardhika penulis ingin melihat sejauh mana upaya organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran berperspektif gender pada pengurus organisasi Perempuan Mahardhika. Tak hanya itu, disini peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana upaya program dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi Perempuan Mahardhika dalam meluaskan kesadaran gender dan

mengutamakan partisipasi perempuan dalam wujud gerakan dan faktor pendukung dan faktor penghambat bagi organisasi Perempuan Mahardhika. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *civil society organization* serta peran organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender pada pengurus organisasi Perempuan Mahardhika.

Berdasarkan identifikasi permasalahan penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender sebagai tujuan organisasi?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat bagi organisasi Perempuan Mahardhika?
3. Apakah peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *Civil Society*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan upaya organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender sebagai tujuan organisasi.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat bagi organisasi Perempuan Mahardhika.

3. Mendeskripsikan peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *Civil Society*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun masing-masing manfaat tersebut pada penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu Sosiologi, khususnya mengenai organisasi perempuan yang ada di Indonesia.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sama tentang peran organisasi perempuan sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran gender untuk menjadi bahan kajian pustaka dalam penyusunan penelitian.
3. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai peran organisasi perempuan sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran gender.

B. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian mengenai peran organisasi perempuan sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran gender menjadi pengetahuan baru

bagi masyarakat bahwa organisasi perempuan yang dibentuk sangat penting untuk menciptakan kesadaran terhadap kesadaran gender.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran organisasi perempuan sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran gender.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Pada tinjauan penelitian sejenis berguna untuk kelancaran proses penelitian dan menjadi bahan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan dan tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bahas, sebagai berikut:

Pertama, dalam tulisan M Zainal Anwar yang berjudul *Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan*⁹ ini ingin melihat bagaimana upaya organisasi perempuan dapat membangun kesejahteraan bagi kaum perempuan khususnya yang tinggal di desa. Berangkat dari permasalahan yang ada, yaitu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ternyata masih lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Dengan begitu, secara umum posisi perempuan dalam memperoleh lapangan kerja dapat dikatakan masih lemah.

⁹ M Zainal Anwar, *Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan*, Sosiologi Reflektif, Volume 8, No.1 Tahun 2013. hlm. 134.

Konsep yang digunakan adalah feminisasi kemiskinan dan konsep organisasi perempuan. Pada periode 1970-an, Diana Pearce dalam M Zainal Anwar pernah mengajukan konsep tentang feminisasi kemiskinan dalam tulisannya berjudul *“The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare”*. Feminisasi kemiskinan merujuk pada adanya kenyataan sebagian besar warga miskin berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan pandangan Diana, salah satu faktor utama kemiskinan yang menimpa kaum perempuan adalah karena terpisahnya mereka dari suami atau pasangannya, entah karena faktor kematian, tetapi yang seringkali terjadi adalah karena sebab perceraian. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan.

Tulisan ini meyakini bahwa dengan adanya berorganisasi, maka kaum perempuan memiliki peluang untuk bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pada akhirnya bisa mengantarkan kaum perempuan pada gerbang kesejahteraan. Salah satu cara bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam kegiatan sosial maupun dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungannya adalah dengan terlibat dalam sebuah organisasi.

Hasil dari penelitian ini adalah organisasi perempuan telah menjadi penguatan perempuan. Dengan adanya organisasi perempuan dapat memikirkan dan memecahkan masalah mereka secara bersama-sama. Organisasi ini menjadi momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik. Melalui organisasi, perempuan dapat memikirkan dan memecahkan masalah mereka secara bersama-sama.

Simpulan dari tulisan ini adalah pemerintah perlu memperluas keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan publik dan tidak hanya menjadikan perempuan sebagai sasaran atau obyek sebuah program atau kebijakan. Praktik perempuan dan organisasi perempuan dalam mengembangkan berbagai jenis sumber penghidupan sebagai upaya keluar dari kemiskinan bisa menjadi inspirasi bagi gerakan memperkuat peran perempuan di desa. Melalui adanya organisasi, maka kaum perempuan memiliki ruang untuk identifikasi bersama pemecahan masalah kemiskinan berdasarkan potensi atau aset yang dimiliki atau yang berada di lingkungannya.

Persamaan penelitian M Zainal Anwar dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang organisasi perempuan yang menjadikan momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik, sedangkan perbedaan M Zainal Anwar dengan penelitian peneliti adalah penelitian M Zainal Anwar membahas organisasi perempuan yang berfokus di desa, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran berspektif gender pada sumberdayanya.

Kedua, pada tulisan Lilik Aslichati yang berjudul *Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*¹⁰ ini akan membahas mengenai bagaimana organisasi dapat membentuk pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK. Tulisan ini dimulai dari permasalahan yang ada,

¹⁰ Lilik Aslichati, *Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 1, Maret 2011, hlm.2.

yaitu selama lebih dari dua dasa warsa, pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita (2007) peningkatan tersebut masih belum sebagaimana diharapkan, yaitu terwujudnya keadilan dan keselarasan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan, tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini menggunakan konsep pemberdayaan perempuan. Menurut Aritonang dalam Lilik Aslichati pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Metodologi yang digunakan adalah dengan

menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasar pada kondisi lapangan yang berbeda karakternya, penyajian dibagi menurut lokasi pengambilan sampel, yaitu Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Ciputat, serta Pondok Aren pada bagian kedua. Pada Kecamatan Pasar Minggu sampel yang diambil adalah anggota PKK (pengurus dan anggota) yang aktif terlibat langsung dalam kegiatan PKK di 4 (empat) RW dengan jumlah responden 29 orang yang berusia 24 tahun sampai dengan 65 tahun dengan jumlah terbanyak pada usia tengah baya yaitu antara usia 38 tahun sampai 50 tahun. Di kelurahan Jatipadang maupun kelurahan Pasar Minggu, sudah terbentuk 5 (lima) Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK, dan saat ini kegiatannya sudah berjalan baik dan terlaksana sesuai program kerja dari pusat (Walikota Jakarta Selatan). Kegiatan yang paling menonjol dan dirasakan secara langsung manfaatnya bagi warga atau masyarakat di kecamatan Pasar Minggu adalah kegiatan pendidikan, pelestarian lingkungan dan kesehatan. Kegiatan yang belum berjalan sebagaimana diharapkan adalah pembangunan kehidupan berkoperasi, karena masih terbatas pada kegiatan simpan pinjam saja yang dilakukan pada acara arisan bulanan. Pada Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pondok Aren Pengumpulan data di Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pondok Aren dilakukan lebih banyak melalui diskusi kelompok dan pengamatan di lapangan pada kegiatan yang sedang berjalan, seperti Posyandu, majelis Ta'lim dan PAUD. Responden adalah pengurus dan kader

PKK yang berusia antara 30 tahun sampai dengan 55 tahun, dengan tingkat pendidikan paling tinggi sarjana (S1), dan paling rendah adalah SD. Kegiatan PKK Kecamatan Ciputat belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan PKK. Dari 5 Pokja yang seharusnya, baru beberapa Pokja yang melakukan kegiatannya, yaitu Pokja I, Pokja II dan Pokja IV. Hal ini terjadi karena baik kecamatan Ciputat maupun kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan termasuk daerah pemekaran baru yang mungkin belum sempat menata dan mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan.¹¹

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau pensiunan.

Berdasarkan penelitian Lilik Aslichati ini terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian peneliti, yaitu persamaannya sama-sama membahas mengenai organisasi perempuan sebagai arena perempuan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Lilik Aslichati terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian Lilik Aslichati membahas

¹¹ Ibid, hlm 5.

bagaimana mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan melalui PKK sebagai salah satu ikon bergeraknya *civil society* dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, sedangkan peneliti lebih melihat organisasi perempuan sebagai *civil society* dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan gender.

Ketiga, pada tulisan Anung Pramudyo yang berjudul *Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi*.¹² Perubahan yang terjadi di sekitar organisasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada tingginya persaingan. Globalisasi juga ikut berperan dalam mempercepat perubahan tersebut. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan agar tidak tertinggal oleh para pesaingnya. Peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat diperlukan dalam upaya mengatasi perubahan serta mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasinya. Kepemimpinan dipercaya sebagai satu kekuatan kunci penggerak organisasi yang mampu membangun suatu budaya baru yang sesuai dengan perubahan. Kepemimpinan juga diyakini banyak pihak berkaitan erat dengan keberhasilan suatu organisasi.

Pemimpin di suatu organisasi mempunyai posisi yang dominan dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu organisasi. Kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi merupakan gambaran kinerja yang diberikan oleh pemimpin dalam

¹² Anung Pramudyo, *Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi*, JBMA Vol. I, No. 2, Februari 2013, hlm. 49.

mengelola organisasi tersebut. Pemimpin yang baik akan dapat mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Tulisan ini juga ingin melihat bagaimana implementasi manajemen kepemimpinan dalam pencapaian tujuan organisasi. Peranan kepemimpinan yang begitu besar bagi kesuksesan organisasi tersebut membuat kepemimpinan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari. Tulisan ini akan mencoba mengupas bagaimana cara mengimplementasikan manajemen kepemimpinan dalam mewujudkan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya.

Konsep yang dipakai adalah konsep organisasi dan konsep kepemimpinan. Organisasi terdiri dari sekelompok orang, sehingga untuk dapat berhasil maka diperlukan pengelolaan atau manajemen yang tepat. Stoner dkk dalam Anung Pramudyo menyatakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disini peran pemimpin adalah sangat besar dalam menjalankan fungsi manajemen yang lain yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian organisasi. Pemimpin adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap

organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi adalah terdiri dari sekumpulan orang yang tentumempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda.¹³

Kesimpulan dari tulisan ini adalah kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya akan sangat tergantung pada pemimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penting kiranya dalam organisasi untuk melaksanakan manajemen kepemimpinan yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan yang dilaksanakan di organisasi harus didukung dengan adanya karakter kepemimpinan (*leadership characters*) yang kuat dan pelaksanaan prinsip-prinsip kepemimpinan (*leadership principles*) secara baik dan benar. Karakter dan prinsip kepemimpinan tersebut kemudian apabila dibudayakan ke seluruh anak buah maka mereka akan mereka memahami, menghayati, dan melakukannya sehingga akan dapat membentuk iklim kepemimpinan (*leadership climate*) dalam organisasi. Iklim kepemimpinan ini memungkinkan organisasi menjalankan siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) secara efektif. Dengan demikian maka pencapaian tujuan organisasi akan dicapai dengan mudah.

¹³Ibid, hlm 50.

Persamaan penelitian Anung Pramudyo dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memfokuskan pada tujuan dari organisasi. Perbedaan penelitian Anung Pramudyo dengan peneliti terletak pada permasalahan penelitiannya. Penelitian Anung Pramudyo memfokuskan pada implementasi kepemimpinan sebagai tujuan organisasi sedangkan peneliti fokus pada permasalahan bagaimana organisasi Perempuan Mahardhika bertujuan untuk dapat dijadikan alat untuk mencapai kesadaran gender.

Keempat, penelitian yang selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Latuconsina¹⁴ ini berjudul *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai demokrasi yang berkaitan dengan *civil society* dimana permasalahan yang diangkat adalah perkembangan demokrasi dan *civil society* di Indonesia, hubungan antara demokrasi dan *civil society*, dan pelaksanaan demokrasi dan *civil society*. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip

¹⁴ Nuraini Latuconsina, *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*, Jurnal Populis Vol. 7 No. 2, Tahun 2013, hlm.12.

universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) Kebebasan; (2) Kesamaan; (3) Kedaulatan Suara Mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu.

Penelitian ini membahas demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan. Perkembangan *civil society* di Indonesia sepenuhnya belum dapat ditemukan, karena masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi proses transformasi sosial, disatu pihak dan di pihak yang lain kekuasaan negara sangatlah besar dibanding kekuasaan masyarakat itu sendiri.

Persamaan penelitian Latuconsina dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *civil society*. Perbedaan penelitian Latuconsina dan penelitian peneliti adalah penelitian Latuconsina lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan *civil society* dan demokrasi sedangkan penelitian peneliti adalah mengkaji organisasi Perempuan Mahardhika sebagai salah satu bentuk *civil society* dalam meningkatkan kesadaran gender.

Kelima, pada tulisan Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati yang berjudul mengenai *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali* ini berangkat dari permasalahan adanya keunikan dan kekhasan kebudayaan Bali yang tidak terlepas dari kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal. Menurut Sancaya Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati, budaya patriarki dalam

kebudayaan Bali dinyatakan bersumber dari adanya konsep purusha dan predana, yang melambangkan jiwatman (roh) yang bersifat abadi (purusha), dan fisik manusia yang mempunyai sifat berubah-ubah (prakirti). Hal ini mengakibatkan ketimpangan atau kesenjangan terhadap hak dan kewajiban terhadap kaum perempuan.

Tulisan ini ingin juga ingin melihat bagaimana pengalaman mengenai budaya Bali dihubungkan dengan pemaknaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Memahami dan mendeskripsikan persepsi perempuan Bali dalam memaknai konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam ruang lingkup budaya Bali, realitas-realitas yang terjadi pada perempuan Bali, dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi perempuan Bali tersebut.

Konsep yang digunakan adalah konsep kesetaraan gender dan konsep peran gender. Peran gender dalam Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati adalah suatu set harapan yang menetapkan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan berperasaan. Konsep KKG dari pemerintah yang berasal dari konsep budaya Barat dibenarkan oleh Megawangi yang menyatakan konsep kesetaraan gender menurut UNDP (United Nations Development Program) sebagai konsep kesetaraan kuantitatif (50/50), yaitu kesetaraan sama rata antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, dan partisipasi politik.¹⁵ Metode

¹⁵ Ni Made, D.W., & Sri H., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali*, Jurnal Psikologi Undip Vol.13 No.2 Oktober 2014, Tahun 2014, Hlm.158.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi semi-partisipan. Subjek penelitian ini berjumlah tiga orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan subjek memiliki persepsi berbeda-beda terhadap konsep KKG dalam budaya patriarki Bali karena adanya perbedaan pengalaman yang dimaknai secara berbeda pula. Perbedaan dalam persepsi perempuan Bali terhadap KKG dalam budaya patriarki Bali ditentukan oleh ada atau tidaknya penyesuaian diri dan dukungan sosial yang mendukung pembentukan konsep diri individu.

Simpulan dari penelitian ini adalah Keadilan dan kesetaraan gender (KKG) merupakan bentukan kata yang terdiri dari kesetaraan gender dan keadilan gender. Konsep KKG tersebut yang dipersepsikan oleh kaum perempuan Bali dengan berdasarkan budaya Bali yang berbentuk patriarki. Penilaian terhadap diri dan orang lain membentuk pemaknaan subjek terhadap konsep KKG. Ketiga subjek memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap konsep KKG yang dilihat berdasarkan sudut pandang budaya patriarki Bali. Adanya konsep ketidakadilan gender muncul sebagai pembandingan terhadap konsep KKG yang dipersepsi.

Persamaan penelitian Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memfokuskan pada permasalahan gender pada perempuan. Permasalahan adanya keunikan dan kekhasan kebudayaan Bali yang tidak

terlepas dari kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal. Perbedaan penelitian Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan penelitiannya. Penelitian Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati berdasarkan kondisi ruang lingkup budaya Bali dan realitas-realitas yang terjadi pada perempuan Bali sedangkan penelitian peneliti fokus pada permasalahan bagaimana organisasi perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gender.

Keenam, pada tulisan Retno Suhapti yang berjudul *Gender dan Permasalahannya*¹⁶ ini membahas mengenai konsep gender pada realitas kehidupan. Di lingkungan keluarga adalah tempat yang terpenting bagi seseorang karena merupakan tempat pendidikan yang pertama kali dan di dalam keluarga pula seseorang banyak bergaul serta mengenal kehidupan. Di dalam keluarga konsep gender sangat dominan. Menurut teori gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai isteri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga. Menurut Beechey dalam Retno Suhapti menjalankan tugas sebagai isteri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Untuk menjalankan tugas sebagai isteri dan ibu dengan baik, sejak kecil anak perempuan telah dididik untuk bisa memasak, menjahit, mencuci, menyeterika dan yang lebih penting kepada anak perempuan tersebut ditanamkan kepercayaan bahwa dia akan bertemu

¹⁶ Retno Suhapti, *Gender dan Permasalahannya*, Jurnal Buletin Psikologi Tahun III Nomor 1 Agustus 1995, hlm. 46.

dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Di lingkungan pendidikan konsep gender juga dominan. Sejak masa kanak-kanak orang tua telah memberlakukan pendidikan yang berbeda pada anak-anak berdasar konsep gender sebagai contoh kepada anak perempuan diberikan permainan boneka sedangkan anak laki-laki memperoleh mobil-mobilan dan senjata sebagai permainannya. Perempuan dianggap lemah di bidang matematika, sebaliknya laki-laki dianggap lemah dalam bidang bahasa. Di lingkungan pekerjaan dari segi upah masih banyak dijumpai bahwa perempuan menerima upah lebih rendah dari laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama dengan dalih bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama. Disamping upah masih ada juga perbedaan kesempatan yang diberikan antara karyawan perempuan dan laki-laki dimana pada umumnya kesempatan lebih diprioritaskan untuk laki-laki.

Hasil dari tulisan ini adalah tampak bahwa perlakuan yang diterima oleh perempuan selama ini sangatlah tidak adil, perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk menjadikan adanya kesempatan yang sama dan kedudukan yang sejajar bagi perempuan dan laki-laki di masyarakat bukanlah perjuangan yang mudah, melawan atau mengubah tatanan apapun yang sudah mapan merupakan suatu hal yang sulit. Untuk itu dibutuhkan kemauan yang keras untuk perempuan harus mengejar ketinggalannya dari kaum laki-laki untuk meraih kesempatan yang tidak didapat sebelumnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi sejajar antara perempuan dan laki-laki di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan Inggris saja membutuhkan waktu sekitar 50 tahun lagi.

Perempuan Indonesia masih diperlakukan tidak adil dan masih merupakan masyarakat nomer dua di Indonesia. Masih banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa tempat yang paling utama bagi kaum perempuan adalah di rumah sebagai isteri dan ibu pendidik bagi anak-anaknya. Bila dibutuhkan perempuan Indonesia bisa bekerja mencari nafkah di luar rumah tetapi hasil pendapatan yang diperolehnya biasanya bukan merupakan pendapatan pokok dalam rumah tangga tersebut. Pada saat ini di Indonesia jumlah perempuan yang bekerja sudah meningkat bila dibanding dengan kondisi 20 tahun yang lalu meskipun tetap belum seimbang dengan laki-laki.

Persamaan penelitian Retno Suhapti dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memfokuskan pada permasalahan gender pada perempuan. Perbedaan penelitian Retno Suhapti dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahan penelitiannya. Penelitian Retno Suhapti berfokus pada kondisi permasalahan gender pada lingkup keluarga, pendidikan dan pekerjaan sedangkan penelitian peneliti fokus pada permasalahan bagaimana organisasi perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gender.

Untuk dapat melihat jelas mengenai persamaan dan perbedaan di antara enam penelitian yang sudah dilakukan, peneliti akan mendeskripsikannya melalui tabel perbandingan penelitian sejenis dibawah ini:

1.2 Tabel Perbandingan Penelitian Sejenis

No.	Jenis Referensi	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Nasional	Organisasi Perempuan dan Kesejahteraan	Organisasi perempuan telah menjadi penguatan perempuan. Organisasi menjadi momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik serta perempuan dapat memikirkan dan memecahkan masalah mereka secara bersama-sama.	Sama-sama membahas tentang organisasi perempuan yang menjadikan momentum perempuan untuk tidak lagi terkungkung di wilayah domestik.	Penelitian M Zainal Anwar membahas organisasi perempuan yang berfokus di desa, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada organisasi yang berjejaring di beberapa kota.
2.	Jurnal Nasional	Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan	Organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau pensiunan.	Sama-sama membahas mengenai organisasi perempuan sebagai arena perempuan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan.	Penelitian Lilik Aslichati membahas bagaimana mengembangkan dan berbagai potensi yang ada pada perempuan melalui PKK sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan keluarga, sedangkan peneliti lebih melihat organisasi perempuan sebagai <i>civil society</i> dalam meningkatkan kesadaran gender.

No.	Jenis Referensi	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Jurnal Nasional	Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi.	Kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya akan sangat tergantung pada pemimpinnya. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi.	Persamaan penelitian Anung Pramudyo dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memfokuskan pada tujuan dari organisasi.	Penelitian Anung Pramudyo memfokuskan pada implementasi kepemimpinan sebagai tujuan organisasi sedangkan peneliti fokus pada permasalahan bagaimana organisasi Perempuan Mahardhika bertujuan untuk mencapai kesadaran gender.
4.	Jurnal Nasional	Perkembangan Demokrasi dan <i>Civil Society</i> di Indonesia	Membahas mengenai demokrasi yang berkaitan dengan <i>civil society</i> pada perkembangan demokrasi dan <i>civil society</i> di Indonesia. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Perkembangan <i>civil society</i> di Indonesia sepenuhnya belum dapat ditemukan, karena masyarakat Indonesia tengah menghadapi proses transformasi sosial.	Persamaan penelitian Latuconsina dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai <i>civil society</i> .	Penelitian Latuconsina lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan <i>civil society</i> dan demokrasi sedangkan penelitian peneliti adalah mengkaji organisasi Perempuan Mahardhika sebagai salah satu bentuk <i>civil society</i> .

No.	Jenis Referensi	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Jurnal Nasional	Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali	Perempuan Bali memiliki persepsi berbeda-beda terhadap konsep KKG dalam budaya patriarki Bali karena adanya perbedaan pengalaman yang dimaknai secara berbeda pula. Perbedaan dalam persepsi perempuan Bali terhadap KKG dalam budaya patriarki Bali ditentukan oleh ada atau tidaknya penyesuaian diri dan dukungan sosial yang mendukung pembentukan konsep diri individu.	Sama-sama memfokuskan pada permasalahan kesetaraan gender pada perempuan. Permasalahan adanya keunikan dan kekhasan kebudayaan Bali yang tidak terlepas dari kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan Bali yang berbentuk patrilineal.	Penelitian Ni Made Diska Widayani dan Sri Hartati berdasarkan kondisi ruang lingkup budaya Bali dan realitas-realitas yang terjadi pada perempuan Bali sedangkan penelitian peneliti fokus pada permasalahan bagaimana organisasi perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gender.
6.	Jurnal Nasional	Gender dan Permasalahannya	Perlakuan yang diterima oleh perempuan selama ini sangatlah tidak adil, perempuan tidak mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk menjadikan kesempatan yang sama dan kedudukan yang sejajar bagi perempuan dan laki-laki di masyarakat bukan perjuangan mudah.	Persamaan penelitian Retno Suharti dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memfokuskan pada permasalahan gender pada perempuan.	Penelitian Retno Suharti berfokus pada permasalahan gender dilingkup keluarga, pendidikan dan pekerjaan sedangkan peneliti fokus pada organisasinya.

Sumber: Analisis Peneliti (2020)

Berdasarkan tinjauan pustaka yang digunakan untuk penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti dapat menambah pengetahuan dan informasi tersebut untuk mendukung pelaksanaan penelitian terkait peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *civil society organization* dalam meningkatkan kesadaran gender. Tinjauan pustaka yang dilakukan dapat membantu dalam membuat kerangka berpikir dalam penelitian ini dan hal ini tentu dapat juga membantu peneliti untuk kelancaran dalam proses penelitian ini.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Organisasi

Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.¹⁷ Menurut James D. Mooney dalam Rois Arifin pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sementara menurut Chester I Barnard, organisasi didefinisikan sebagai suatu wadah sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, organisasi merupakan suatu struktur fungsi dan sistem kerja

¹⁷ Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus*, (Alfabeta: Bandung, 2014) hlm. 2.

sama, yaitu adanya suatu struktur dan sistem kerja sama yang dilakukan berdasarkan aturan dan penjabaran fungsi-fungsi pekerjaan secara formal.¹⁸

Organisasi umumnya memiliki lima karakteristik utama. Pertama, masing-masing organisasi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Cerminan dari tujuan suatu organisasi biasanya tergambar pada sasaran-sasaran baik jangka panjang maupun jangka pendek. Secara umum, tujuan organisasi mencakup tiga bidang utama: tingkat keuntungan (*profitability*); mengejar pertumbuhan (*growth*); dan bertahan hidup (*survive*). Kedua, adalah masing-masing organisasi memiliki orang-orang. Seseorang yang berusaha mencapai tujuannya sendiri bukanlah dikatakan sebagai berorganisasi. Organisasi adalah kelompok dua atau lebih orang yang ingin mencapai tujuannya. Ketiga, organisasi perlu mengembangkan suatu struktur agar anggota dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mudah. Struktur merupakan saluran formal untuk melaporkan dan memberikan perintah, serta membagi wewenang dan tanggung jawab. Termasuk di dalamnya juga apa yang disebut Barlett dan Ghoshal dalam Rois Arifin sebagai peralatan mikro struktural, seperti gugus tugas dan kelompok proyek. Keempat, sistem dan prosedur yang terdiri dari berbagai metode untuk menetapkan pengolahan informasi, pembuatan

¹⁸ Rois Arifin, Amirullah, dan Khalikussabir, *Budaya dan Perilaku Organisasi*, (Malang: Empat Dua Kelompok Intrans Publishing, 2017) hlm. 2.

keputusan dan pengambilan tindakan yang berlainan. Kelima, nilai-nilai dan budaya.¹⁹

Chester I. Barnard dalam Rois Arifin Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama organisasi, menurut pandangan Barnard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²⁰ Barnard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Barnard juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Barnard adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi.

Max Weber memberikan sumbangan yang berharga dalam masa *Classical Theory* dengan mengetengahkan pendapatnya tentang struktur organisasi dalam suatu organisasi. Beliau orang pertama yang mengemukakan pendapatnya tentang “Birokrasi”. Pandangan Max Weber tentang birokrasi menjadi pegangan kebanyakan organisasi dalam rangka mendesain struktur organisasi. Birokrasi menurut pandangan Weber merupakan alat yang paling efisien dalam mendesain struktur organisasi dalam mencapai tujuannya.

¹⁹ Ibid., hlm. 3

²⁰ Ibid., hlm. 11

Birokrasi sangat diperlukan bagi organisasi-organisasi besar dan kompleks. Pengorganisasian organisasi dengan memperhatikan birokrasi akan menampakkan prinsip-prinsip dasar dari organisasi, antara lain wewenang, hierarki, pembagian tugas, kesatuan komando, SOP (*Standard Operasional Procedure*), dan pengambilan keputusan.²¹

Organisasi berasal dari kata organ dalam sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Oleh karena itu dapat didefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan yang mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Organisasi bisa dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Bagi masyarakat, organisasi menjadi media atau alat untuk mencapai tujuan yang dianggap penting. Contohnya, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi menjadi ujung tombak bagi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara lain halnya bagi anggota masyarakat, universitas menjadi lembaga yang bisa membantu dia meraih pengetahuan dan ijazah yang bisa digunakan untuk masuk kedalam pasar kerja.

Tujuan dari organisasi formal dapat dipahami sebagai satu atau beberapa hal yang hendak dicapai atau direalisasikan pada masa yang akan

²¹ Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm.19-20.

datang. Tujuan organisasi ditetapkan oleh manajemen organisasi. Meski demikian, sebagai sebuah konsep, tujuan organisasi dapat dipahami beragam. Setiap organisasi pasti memiliki tujuannya, tetapi bentuk dari tujuan tersebut berbeda-beda pada setiap organisasi. Secara umum, Scott dalam Umar Baihaqki dan Rusfadia Saktiyanti Jahja merumuskan lima fungsi dari tujuan organisasi, yaitu: kognitif, motivasional, simbolik, justifikatif, dan efaluatif.²²

1. Fungsi kognitif biasanya berlaku dalam tujuan organisasi yang dikelola dengan pendekatan rasional. Tujuan tersebut sifatnya terukur, sehingga tersedia beragam alternatif perencanaan untuk mencapainya. Tujuan ini juga bisa menjadi acuan dalam pengendalian organisasi dari pihak manajemen.
2. Tujuan motivasional ditetapkan oleh organisasi yang dikelola dengan pendekatan natural. Tujuan organisasi menjadi sumber identifikasi keterlibatan setiap partisipan dengan organisasi. Tujuan organisasi dapat menjadi instrumen ideologis yang dikelola oleh organisasi dalam rangka meraih dukungan dari lingkungan. Tujuan motivasional biasanya diekspresikan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

²² Umar Baihaqki dan Rusfadia Saktiyanti Jahja, *Pengantar Sosiologi Organisasi Formal*, (Jakarta: Buku Ajar Universitas Negeri Jakarta, 2018), hlm. 53.

3. Tujuan simbolik menjadi karakteristik pendekatan kelembagaan terhadap organisasi. Pada pendekatan rasional dan natural, tujuan organisasi menjadi arahan bagi anggota-anggota organisasi. Sementara dalam pendekatan kelembagaan, tujuan organisasi menjadi simbol yang menekankan signifikansi organisasi terhadap hadirinnya, seperti publik, klien, serta regulator. Tujuan simbolik ini menjadi salah satu cara bagi organisasi untuk meraih legitimasi, mitra, sumberdaya dan personel.
4. Tujuan justifikasi membuat tujuan organisasi menjadi berbeda dengan tujuan dari organisasi pada umumnya. Tujuan organisasi ini justru ditetapkan setelah tindakan organisasi telah berlangsung. Tujuan tersebut menjadi rasionalisasi dari aktifitas organisasi yang telah berjalan. Latar belakang dari ditetapkannya tujuan organisasi tersebut bisa disebabkan karena organisasi berkembang begitu pesat, sehingga terkadang keberhasilan di suatu bidang ternyata tidak direncanakan sebelumnya.
5. Tujuan evaluasi, tujuan ini bisa berlaku bagi kinerja partisipan organisasi, dan kepada organisasi secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara tujuan awal dengan capaian organisasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, organisasi

bisa merevisi tujuan di masa depan, atau membenahi struktur dan personel organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam sebuah organisasi, tujuan yang hendak dicapai didalamnya tidak bersifat tunggal. Organisasi bisa memiliki lebih dari satu tujuan. Organisasi Perempuan Mahardhika sebagai sebuah organisasi bertujuan sebagai meningkatkan kesadaran gender dan meluaskan pendidikan feminisme dalam wujud gerakan perempuan. Organisasi Perempuan Mahardhika juga merupakan organisasi massa perempuan.

Tujuan organisasi juga dapat dikategorikan berdasarkan pada basis perumusannya. Menurut Christenssens dan kawan-kawan dalam Umar Baihaqi dan Rusfadia Saktiyanti Jahja kategori tujuan organisasi berdasarkan basis perumusannya meliputi tujuan ofisial, tujuan operasional, dan tujuan informal.²³

1. Tujuan ofisial dari organisasi biasanya tersirat dalam visi organisasi. Ciri-ciri dari tipe tujuan ini adalah sifat pernyataan atau konsepnya yang abstrak. Misalnya, “untuk kebaikan umum”. “keadilan sosial”, atau “untuk membangun solidaritas antar etnis” karena sifatnya yang abstrak ini, bisa jadi tujuan organisasi tersebut tidak akan pernah tercapai.

²³ Ibid., hlm. 56

2. Tujuan operasional bersifat spesifik, eksplisit, dan instrumental bagi organisasi. Tujuan operasional biasanya diturunkan dari tujuan resmi organisasi. Tujuan-tujuan operasional dirumuskan ke dalam prioritas karena organisasi memiliki keterbatasan sumber daya.
3. Tujuan informal dari sebuah organisasi erat kaitannya dengan aspek budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan norma yang dijunjung dalam organisasi tersebut, sebagai panduan bagi semua partisipan organisasi dalam bertindak.

1.6.2 Organisasi Perempuan Mahardhika Sebagai *Civil Society Organization*

Semenjak awal tahun 1990-an, konsep *civil society* menjadi wacana di lingkungan akademik maupun aktivis gerakan sosial. *Civil society* sering disebut masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah *civil society* berasal dari bahasa latin, yaitu *civitas dei* atau kota Illahi. Asal kata *civil* adalah *civilization* (beradab). *Civil society* secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab.²⁴

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.73.

Konsepsi modern tentang *civil society* pertama kali dipakai oleh Hegel dalam *Philosophy of Right* pada tahun 1821. Dia menyebutkan bahwa “*Civil society is sphere of ethical life interposed between the family and the state*”. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Larry Diamond dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo yang mengartikan bahwa “*Civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from the state, and bound by legal order or set of shared rules*”. Dengan demikian pandangan teori liberal tentang *civil society* pada hakekatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan terbebas dari hegemoni *state*.

Dalam bahasa Indonesia istilah *civil society* sulit diterjemahkan secara langsung, misalnya dengan masyarakat sipil Menurut Hikam Suryo Sakti Hadiwijoyo. Hal ini disebabkan karena istilah sipil di Indonesia diterjemahkan sebagai bukan militer (non militer), padahal arti *civil* atau *bürgerliche* merupakan seluruh lapisan masyarakat yang bukan negara dan bukan keluarga. *Bürgerliche* juga tidak dapat diterjemahkan sebagai borjuis karena borjuis hanya merupakan salah satu kelas dalam masyarakat. Oleh karena itu maka Magnis Suseno dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo menterjemahkannya sebagai masyarakat luas. Di lihat dari bahasa asalnya, *civil society* berasal dari bahasa latin “*civilis societas*” yang megacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain, kata *civil society* sebenarnya berasal dari

khasanah kosa kata Latin, yaitu *civitas dei* atau “Kota Illahi” sehingga secara harfiah kata *civil society* diterjemahkan dengan masyarakat kota. Akar kata *civil* adalah *civilization*, yang berarti beradab sehingga *civil society* sering pula diterjemahkan dengan masyarakat beradab. Oleh karena itu, *civil society* dapat dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian atau masyarakat jahiliyah.²⁵

Konsep *civil society* memiliki beragam pengertian sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Gramscian, Tocquevillian dan sebagiannya lagi menggunakan pemahaman Hegelian.

Civil Society, Menurut Gramsci, terdiri dari beragam organisasi dengan beragam pula ideologinya yang membentuk dan menantang tatanan sosial yang ada. Hegemoni kultural dan politik dari kelompok yang berkuasa dibentuk di dalam arena *civil society* ini. Bagi Gramsci dalam Abdi Rahmat perubahan sosial dan struktural dapat terjadi dimulai dari arena *civil society*.²⁶ Mengacu pada pengertian *civil society* yang dikemukakan oleh de Tocqueville bahwa *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan

²⁵Ibid., hlm. 74

²⁶Abdi Rahmat, op. cit. hlm 3

keswadayaan yang mengarah pada hidup masyarakat yang mandiri dalam segala hal. Hal ini memungkinkan bila pengelompokan sosial dan politik tidak harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, asosiasi-asosiasi dan berbagai perkumpulan atau organisasi dapat berkembang dengan maju dan terarah apabila didukung oleh iklim politik yang demokratis.²⁷

Pemisahan negara dan masyarakat sipil juga dilakukan oleh Hegel. Menurut Hegel dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, masyarakat sipil sesungguhnya merupakan produk dari masyarakat borjuis, salah satu paket perjanjian kemasyarakatan yang dipenetrasi oleh logika kapitalisme. Masyarakat sipil hanyalah satu bagian saja dari tatanan politik secara keseluruhan. Karena itu, menurut Hegel dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo hubungan negara dan masyarakat sipil tidak bersifat independent. Entitas masyarakat sipil yang dimaksud Hegel dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo sebagai *bürgerliche gesellschaft* itu sangat berbahaya apabila dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan, karena tanpa adanya kontrol akan mengakibatkan timbulnya anarki. Selanjutnya Hegel memilah kehidupan modern menjadi tiga wilayah, yakni keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Keluarga merupakan ruang pribadi yang ditandai dengan hubungan harmonis antar individu dan menjadi tempat sosialisasi pribadi anggota masyarakat. Sementara masyarakat sipil adalah lokasi pemenuhan kebutuhan

²⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 71.

kepentingan-kepentingan ekonomi individu maupun kelompok. Hegel tidak menganggap masyarakat sipil sebagai arena praksis politik yang menurutnya monopoli negara.²⁸

Menurut Eisenstadt dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo terdapat 4 (empat) komponen berkaitan dengan kemungkinan tumbuhnya masyarakat sipil:²⁹

1. Pertama adalah otonomi yang berarti sebuah *civil society* harus lepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.
2. Kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap *agencies of the state*. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (*contacting*), menulis pikiran di media massa, atau dengan terlibat langsung atau tidak langsung organisasi politik.
3. Ketiga, arena publik yang otonom, dimana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, op. cit. hlm 86

²⁹ Ibid., hlm. 82

4. Keempat, arena publik yang terbuka, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan rahasia, eksklusif dan setting yang bersifat korporatif.

Pengertian lain datang dari Adam Ferguson, Menurut Adam Ferguson dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo masyarakat sipil merupakan hasil dari pergeseran peradaban dari masyarakat primitive-kasar menjadi masyarakat beradab yang ditandai oleh kemajuan akal budi, pengetahuan, teknologi, dan industri. Dengan kata lain, menurut Fanja Oz-Salsberger dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, masyarakat sipil dipahami sebagai “sebuah visi-etis dalam kehidupan bermasyarakat. “pengertian tersebut digunakannya untuk mengantisipasi perubahan sosial akibat revolusi industri dan munculnya kapitalisme.³⁰

Civil Society Organization (CSO) dikategorikan sebagai organisasi non provit. Susannah Morris³¹ melakukan teoritisasi terhadap fenomena CSO dengan mencirikan organisasi sektor non profit tersebut sebagai berikut.

1. Organisasi, atau berbentuk organisasi yang ditandai dengan adanya institusi, struktur dan aturan main.

³⁰ Ibid., hlm. 85

³¹ Suroto, *Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 5 No.9 2015 hlm. 664.

2. Privat, secara definitif terpisah dari institusi negara (non-pemerintah).

Status sebagai lembaga privat atau swasta ini juga diartikan bahwa sektor ini tidak didirikan dan diorganisir oleh pemerintah atau negara.

3. Non profit, dibentuk atau didirikan tidak untuk mengejar laba atau keuangan, tidak membagikan keuntungan organisasi kepada para pengurus, pengelola maupun pendirinya.

4. Mengatur diri sendiri, semua urusannya secara fundamental berada dalam kontrol organisasi tersebut.

5. Sukarela, keanggotaan didasarkan prinsip kesukarelaan, bukan adanya kewajiban hukum, demikian pula dalam upaya nya mengumpulkan dana didasarkan pada prinsip kesukarelaan.

Definisi *civil society* menurut AS. Hikam adalah “wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh

kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi.³²

Kerangka *civil society* dalam pembangunan memiliki 4 peran. *Pertama*, sebagai pemberi layanan kebutuhan masyarakat (*relief service*). CSO melakukan peran ini dimaksudkan untuk membantu kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat baik sebagai individu maupun keluarga. *Kedua*, peran pemberdayaan masyarakat di mana CSO melakukan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, produktifitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat ataupun masyarakat secara umum. *Ketiga*, sebagai kekuatan pengimbang. CSO melakukan upaya-upaya mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi negara ataupun dunia usaha terhadap rakyat. Hal ini ditujukan agar terciptanya suatu sistem politik yang bersih, demokratis, dan berkeadilan dan diakuinya hak-hak rakyat. *Keempat*, adalah peran sebagai lembaga perantara (Intermediasi). Peran ini dilakukan dengan memediasi antara masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga donor. Kemudian, membangun jaringan kerja diantara sesama CSO. Demikian juga, jaringan kerja dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan

³² Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LPES, 1996), hlm. 3.

pencapaian tujuan ataupun misi bersama CSO. Peran ini lebih banyak digunakan dalam melakukan aliansi gerakan.³³

Menurut Budiman Sudjatmiko dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, kesatuan, kohesivitas, atau solidaritas erat kaitannya dengan komunitarisme sebagai salah satu komponen *civil society* yang harus dikembangkan sebagai upaya penguatan *civil society*. Berkaitan dengan hal tersebut, tumbuhnya kohesivitas dan solidaritas dalam *civil society* dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu: a. kesamaan visi dan misi komponen *civil society*, menurut Eddi Wibowo dan Hessel N. Tangkilisan dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo visi memberikan gambaran ke depan mengenai idealisasi yang ingin terwujudkan, kearah mana organisasi pada masa yang akan datang. Sedangkan misi, secara lebih detail menguraikan seluruh cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang berfungsi sebagai arahan dan petunjuk bagi pengambilan keputusan organisasi, b. jaringan kerja *civil society*, jaringan kerja merupakan sarana kerjasama dan interaksi antar komponen dalam *civil society*, c. partisipasi, menurut Eddi Wibowo dan Hessel N. Tangkilisan dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo tingkat partisipasi yang ditunjukkan komponen-komponen *civil society* baik secara kualitas maupun kuantitas dalam sebuah agenda bersama, mengindikasikan bagaimana sebenarnya soliditas atau kesatuan yang ada sebuah *civil society*.³⁴

³³ Abdi Rahmat, op. cit. hlm 59-60

³⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, op. cit. hlm 98

Organisasi Perempuan Mahardhika adalah organisasi *civil society* yang berbentuk NGO yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang setara dan sejahtera. Keberadaan organisasi Perempuan Mahardhika adalah bentuk respon dan tanggung jawab sebagai manusia dalam melawan segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, membangun gerakan perempuan, meluaskan kesadaran feminisme, dan lainnya.

Mewujudkan keberdayaan masyarakat lapis bawah CSO-CSO pemberdayaan melakukannya dengan mengembangkan kapasitas masyarakat, kemudian mendampingi mereka, lalu setelah mampu mandiri, CSO akan melepaskan mereka. Sebelum aksi pemberdayaan tersebut dilakukan CSO akan melakukan terlebih pemetaan kebutuhan dan problem yang dihadapi kelompok marjinal tersebut. Setelah itu, disusunlah rencana aksi atau program pemberdayaan. Hal ini biasanya dilakukan secara partisipatif.³⁵

Hal diatas dilakukan oleh organisasi Perempuan Mahardhika dalam menjalankan perannya sebagai CSO, sebagai contoh ialah salah satu permasalahan pada buruh perempuan yang ada di KBN Cakung beberapa tahun silam yaitu terjadi tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan, lalu organisasi Perempuan Mahardhika bersama dengan FBLP mengadvokasi permasalahan tersebut. Kemudian organisasi Perempuan

³⁵ Ibid., hlm. 88

Mahardhika sebagai CSO mendorong adanya plang area bebas kekerasan seksual di KBN Cakung sebagai bentuk advokasi.

Keterlibatan organisasi *civil society* dapat dilihat dari kontribusi atau tujuan aktifitas mereka dalam mewujudkan *public good* dalam masyarakat baik dalam anggotanya maupun masyarakat luas. Dalam hal ini analisis terhadap karakteristik CSO akan menunjukkan kontribusi dan relevan mereka dengan pembangunan. Karakteristik tersebut terdiri dari 8 kategori yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi pekerja, NGO atau LSM, LSM advokasi, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan akademisi, dan organisasi berbasis komunitas.³⁶

Masyarakat madani (*civil society*) sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Menurut AS. Hikam ada empat ciri utama dari masyarakat madani, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama;

³⁶ Abdi Rahmat, op. cit. hlm 62

³⁷ Suroto, op. cit. hlm 666

2. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya;
3. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; dan
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Berdasarkan dengan ciri-ciri *civil society* diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi Perempuan Mahardhika dapat diposisikan sebagai *civil society organization*, karena organisasi Perempuan Mahardhika berdiri berdasarkan asas kesukarelaan pendiri dan anggota organisasi Perempuan Mahardhika lainnya yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu berjuang mewujudkan masyarakat yang setara dan menghapus segala bentuk diskriminasi. Selain itu organisasi Perempuan Mahardhika juga merupakan lembaga non-profit yang berdiri sendiri atau organisasi non pemerintah dimana organisasi Perempuan Mahardhika secara independen mencari dana sendiri untuk operasional lembaga serta organisasi Perempuan Mahardhika tidak memiliki maksud mencari keuntungan.

1.6.3 Konsep Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang, seringkali bias dan lebih diartikan sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuannya saja. Gender dipahami berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya.

Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa inggris yaitu “gender” yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, di mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, dimana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari tuhan.³⁸

Menurut Judith Waters dan George Ellis dalam Rendra Widyatama gender merupakan kategori dasar dalam budaya, dimana sebagai proses dengan

³⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) hlm. 7.

identifikasi tidak hanya orang, tapi juga pada perbendaharaan kata, pola bicara, sikap dan perilaku, tujuan, dan aktifitas seperti “maskulinitas” atau “feminitas”. Berbagai perbedaan tersebut akhirnya memunculkan stereotip tertentu yang disebut dengan stereotip gender.³⁹

Adapun yang dimaksud gender dalam Nasaruddin Umar dan dkk adalah persoalan nonkodrati, menyangkut perbedaan tugas, fungsi, dan peran yang diberikan oleh masyarakat atau budaya yang diberikan laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Penjabaran gender ini sangat luas yang mencakup aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Gender ini diperuntukkan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sehingga gender ini sebenarnya merupakan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin, bukan alami dan bukan takdir Tuhan.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat

³⁹ Rendra Widhyantama, *Bias Gender Dalam Iklan Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hlm. 4.

membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan

budaya setempat. Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya di depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam

⁴⁰ H Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013). hlm. 1.

memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam untuk berjudi.

Menurut Umar, pada garis besarnya teori gender dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-teori gender dibangun. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan aktivitas laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Sedangkan aliran *nurture* menyatakan bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan konstruksi masyarakat.⁴¹

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan aktivitas dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan aktivitas dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar. Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa

⁴¹ Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunikasi Lokal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm.12.

diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki aktivitas dan tugas yang berbeda. Ada aktivitas dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam sejarahnya pembedaan antara pria dan wanita sudah terjadi sejak zaman dahulu dan dibangun dalam proses yang kompleks dan kurun waktu yang panjang. Bahkan secara umum sebagaimana dijelaskan Martadi dalam Rendra Widyantama sebenarnya di seluruh dunia terdapat kecenderungan pandangan yang sama, yaitu perempuan selalu di bawah posisi pria.⁴² Dalam perjalanan sejarahnya perbedaan gender ini semakin melebar dan bahkan jauh lebih besar dari perbedaan fisik. Perbedaan tersebut telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksikan secara sosial dan kultural.

Seiring menguatnya kesadaran gender, berbagai perbedaan itu dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak adil. Kedudukan perempuan disandingkan dengan pria, tidak sejajar, penuh dengan ketimpangan yang memunculkan ketidakadilan gender.⁴³

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Penindasan terhadap perempuan telah terjadi sepanjang masa, dan secara psikologis hal ini bahkan diterima oleh perempuan itu sendiri. Perempuan dikatakan sebagai kaum nomor dua dan laki-laki lah yang terdepan.

⁴² Rendra Widyantama, op. cit. hlm 11

⁴³ Ibid., hlm. 12

Pandangan gender juga membuat kaum perempuan ter subordinasi. Masalah yang dihadapi perempuan mulai dari tindakan kekerasan yang dilakukan, perempuan yang termarginalkan dalam berbagai hal serta permasalahan perempuan lainnya. Perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan hanya ditempatkan di ranah domestik saja, sedangkan laki-laki berada di ranah publik. Ini merupakan bentukan budaya patriarki.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, tentu sangat dibutuhkan dengan adanya organisasi Perempuan Mahardhika sebagai bentuk CSO yang berbasis organisasi massa perempuan untuk melingkupi kelompok perempuan membuat para perempuan mengorganisir diri dalam sebuah jaringan yang menjadi cikal bakal organisasi. Perempuan dapat menjamin dan mengembangkan kehidupan kelompok perempuan secara jangka panjang. Organisasi perempuan menjadi kunci bagi penguatan perempuan. Hal inilah yang menjadi alasan berdirinya organisasi Perempuan Mahardhika. Tujuan dari organisasi Perempuan Mahardhika adalah berjuang untuk masyarakat yang setara dan sejahtera.

Skema 1.1

Hubungan Antar Konsep



Sumber: Analisis Peneliti (2020)

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Peran Organisasi Perempuan Mahardhika Sebagai *Civil Society Organization* Dalam Meningkatkan Kesadaran Gender adalah menggunakan penelitian kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan bagaimana upaya organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender sebagai tujuan organisasi, mendeskripsikan bentuk program dan kegiatan organisasi Perempuan Mahardhika serta faktor pendukung dan penghambat organisasi Perempuan Mahardhika. Kemudian penulis menjelaskan apakah peran organisasi Perempuan Mahardhika sebagai *civil society* serta peran organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender pada pengurus organisasi Perempuan Mahardhika.

Dalam penelitian kualitatif khususnya pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi atau pengamatan dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dalam menggali data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada lima informan sebagai pengurus organisasi Perempuan Mahardhika dan satu aktivis perempuan senior sebagai informan triangulasi. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari literatur dari penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepada lima pengurus organisasi Perempuan Mahardhika yang bekerja dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di organisasi Perempuan Mahardhika serta pada aktivis perempuan senior yang mengetahui organisasi perempuan di Indonesia dan keberadaan organisasi Perempuan Mahardhika.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijabarkan lima informan kunci dan satu informan triangulasi dalam penelitian ini :

Tabel 1.3 Subjek Penelitian

Nama	Deskripsi	Target Informasi
Latiefah Widuri Retyaningtyas	Anggota organisasi Perempuan Mahardhika Departemen Pengembangan Organisasi	Mengetahui latar belakang terbentuknya organisasi Perempuan Mahardhika serta bentuk kegiatan dan program organisasi Perempuan Mahardhika
Thien Kusna	Anggota organisasi Perempuan Mahardhika Departemen Penggalangan Dana	Mengetahui keadaan organisasi Perempuan Mahardhika serta bentuk kegiatan dan program organisasi Perempuan Mahardhika
Ajeng Pangesti Anggriani	Anggota organisasi Perempuan Mahardhika Departemen TIM Buruh Perempuan	Mengetahui keadaan organisasi Perempuan Mahardhika serta bentuk kegiatan dan program organisasi Perempuan Mahardhika
Sri Arumdiaty Nur Fatimah	Peneliti Muda organisasi Perempuan Mahardhika	Mengetahui keadaan organisasi Perempuan Mahardhika serta bentuk kegiatan dan program organisasi Perempuan Mahardhika
Ayu Maulani	Volunteer Kreatif organisasi Perempuan Mahardhika	Mengetahui keadaan organisasi Perempuan Mahardhika serta bentuk kegiatan dan program organisasi Perempuan Mahardhika
Zumrotin	Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan Aktivis Perempuan Senior	Mengetahui keberadaan organisasi Perempuan Mahardhika

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara (2019)

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di sekretariat Perempuan Mahardhika yang terletak di Jl. Kedondong I No.39, RT.10/RW.9, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kantor pusat. Sementara waktu penelitian dilaksanakan mulai dari April hingga Juni 2019. Penetapan waktu tersebut, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan data secara akurat.

1.7.3 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan pelapor hasil penelitian. Peneliti mencari data sebanyak-banyaknya, menggali informasi data terkait organisasi Perempuan Mahardhika. Peneliti mencari data untuk kebutuhan penelitian dengan turun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan peneliti agar mendapatkan informasi data yang benar-benar akurat sesuai fakta dalam penelitian dan selain itu juga peneliti mengamati dan mengikuti semua kegiatan organisasi Perempuan Mahardhika di Jakarta agar terciptanya interaksi yang kuat antara peneliti dan anggota organisasi Perempuan Mahardhika sehingga semua dilakukan agar tetap menjaga nama baik subyek penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian dan mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui sumber terpercaya, yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder ialah data yang tidak secara langsung diperoleh peneliti, seperti: dokumen pendukung, cuplikan gambar, dan cuplikan video. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya. Peneliti dapat memperhatikan perilaku subjek saat melakukan kegiatan sehari-harinya serta mengamati lokasi penelitian ketika peneliti datang ke tempat kegiatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah di sekretariat organisasi Perempuan Mahardhika dan mengikuti kegiatan yang dijalankan oleh organisasi Perempuan Mahardhika di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan tidak struktur. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada lima pengurus yang bekerja di organisasi Perempuan Mahardhika dan wawancara pada satu aktivis perempuan senior yang mengetahui keberadaan organisasi Perempuan Mahardhika.

3) Studi Dokumentasi

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer ataupun data langsung diperoleh dari orang pertama.⁴⁴

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memperoleh dokumen-dokumen data terkait organisasi Perempuan Mahardhika melalui website organisasi Perempuan Mahardhika dan penelitian yang bersumber dari literatur penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

⁴⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009. hlm. 69.

1.7.5 Triangulasi Data

Menurut Moeleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.⁴⁵ Teknik ini pada dasarnya dilakukan untuk melakukan *cross-check* data atau mengkonfirmasi ulang data lapangan, hal ini berguna untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi data melalui aktivis perempuan senior yang bernama Zumrotin dengan wawancara sebagai data triangulasi yang mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi Perempuan Mahardhika.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Perempuan Mahardhika Sebagai *Civil Society Organization* Dalam Meningkatkan Kesadaran Gender” ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

⁴⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4-6.

penelitian sejenis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, triangulasi data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas tentang awal mulanya terbentuknya organisasi Perempuan Mahardika serta profil informan yang dijadikan responden oleh peneliti. Sehingga dengan penjelasan yang dipaparkan dalam bab kedua ini akan memperoleh realitas gambaran profil organisasi Perempuan Mahardhika.

Bab ketiga, memaparkan hasil temuan lapangan. Dalam bab ini, pemaparan yang difokuskan pada hasil temuan lapangan mengenai pelaksanaan organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender sebagai tujuan organisasi tersebut. Kemudian membahas mengenai latar pemikiran Pembentukan organisasi Perempuan Mahardhika serta program-program dan kegiatan yang dilakukan organisasi Perempuan Mahardhika sebagai strategi mencapai tujuan organisasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat bagi organisasi Perempuan Mahardhika.

Bab keempat, berisikan tentang analisis dari yang berlandaskan pada konsep yang sesuai dalam penelitian. Dalam bab ini pembahasan yang telah dibahas akan dikaitkan dengan konsep *civil society* dan menganalisis peran organisasi Perempuan Mahardhika dalam meningkatkan kesadaran gender pada pengurus organisasi Perempuan Mahardhika.

Bab kelima, dalam bab ini berisikan kesimpulan, peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran-saran dan dalam bab ini diakhiri dengan kata penutup.

